

## **BAB VI**

# **STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

### **6.1. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan tentang bagaimana pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Pendekatan yang komprehensif dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah Daerah baik dalam melakukan transformasi, reformasi maupun perbaikan kinerja birokrasi.

Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan Daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan Daerah.

Metode yang digunakan sebagai alat bantu dalam merumuskan strategi pembangunan jangka menengah Daerah yaitu analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan analisis mengenai hal-hal pokok yang ada di lingkungan yang diasumsikan berpengaruh terhadap apa yang terjadi dan yang akan terjadi di lingkungan Daerah. Lingkungan itu sendiri mencakup dua lingkungan pokok, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Dengan menggunakan analisis SWOT, diharapkan dapat mengungkapkan faktor internal dan faktor eksternal yang dianggap penting dalam mencapai tujuan, yaitu dengan mengidentifikasi kekuatan

*(strength) .....*

(*strength*), kelemahan (*weakness*), kesempatan (*opportunity*) dan ancaman (*threat*). Dengan demikian Daerah harus bisa memaksimalkan kekuatan dan peluang serta meminimalkan kelemahan dan ancaman.

Rumusan strategi dalam pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran Perubahan RPJMD disajikan pada Tabel 6.1.

**Tabel 6.1**  
**Tujuan, Sasaran dan Strategi Perubahan RPJMD**

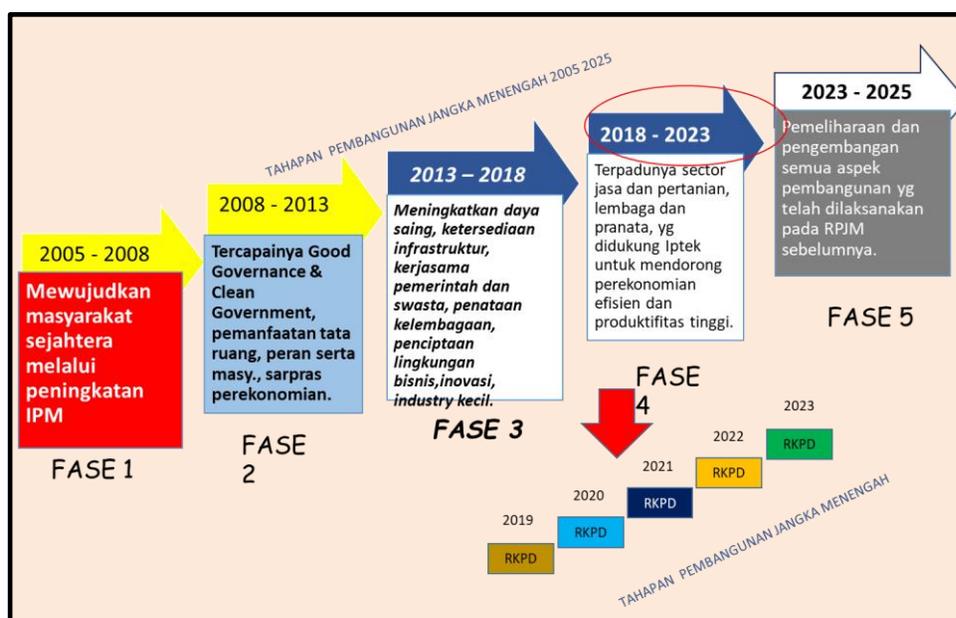
Terwujudnya Kota Sukabumi yang Religius, Nyaman, dan Sejahtera				
MISI 1 : mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, dan berbudaya serta memiliki kesetiakawanan sosial yang tinggi berbasis ketahanan keluarga				
TUJUAN		SASARAN		STRATEGI
1.1	Mewujudkan masyarakat berkualitas yang berakhlak mulia	1.1.1	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama, pemahaman wawasan kebangsaan, keamanan dan ketertiban masyarakat	Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui penerapan nilai nilai agama dan wawasan kebangsaan
		1.1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata
		1.1.3	Meningkatnya ketersediaan layanan pendidikan yang bermutu dan merata	Meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu dan merata
		1.1.4	Terwujudnya Masyarakat yang Kreatif dan Berbudaya	1. Meningkatkan Kolaborasi antar Stakeholders Penta Helix Dalam Pengembangan Kota Kreatif 2. Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan pemuda dan olah raga
		1.1.5	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak melalui penguatan kebijakan, kelembagaan , SDM dan Sistem Informasi Gender
		1.1.6	Meningkatnya ketahanan keluarga dan kesejahteraan sosial	1. Meningkatkan ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga melalui Penguatan Kebijakan, Pengendalian Penduduk dan ketahanan ekonomi keluarga 2. Meningkatkan pemberian pelayanan sosial dengan peran serta dan pemanfaatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

<b>MISI 2 : mewujudkan tata ruang dan infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan</b>				
<b>TUJUAN</b>		<b>SASARAN</b>		<b>STRATEGI</b>
2.1	Mewujudkan Pembangunan tata ruang dan Infrastruktur yang Berkelanjutan	2.1.1	Terwujudnya pemerataan infrastruktur kota yang berkelanjutan	1. Mendorong terciptanya pemerataan dan peningkatan kualitas infrastruktur 2. Mendorong percepatan legalisasi kebijakan infrastruktur dan penataan ruang
		2.1.4	Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas	Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup
		2.1.5	Terwujudnya ketangguhan terhadap bencana	Meningkatkan kapasitas penanganan bencana
<b>MISI 3 : mewujudkan ekonomi Daerah yang maju bertumpu pada sektor perdagangan, ekonomi kreatif, dan pariwisata melalui prinsip kemitraan dengan dunia usaha, dunia pendidikan, dan daerah sekitar</b>				
3.1	Mewujudkan pengembangan ekonomi daerah yang kreatif dan berkelanjutan	3.1.1	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi	1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana pelayanan serta dukungan pembiayaan usaha dan peningkatan akses pasar 2. Memperluas Kesempatan Kerja dan Peluang Usaha
		3.1.2	Meningkatnya peran perdagangan dalam stabilitas perekonomian melalui kemitraan dengan dunia usaha, dunia pendidikan, dan daerah sekitar	1. Meningkatkan kualitas Data, Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, dan sarana prasarana Perdagangan serta dukungan Teknologi dan Informasi 2. Meningkatkan perdagangan melalui kemitraan dengan dunia usaha, dunia pendidikan, dan daerah sekitar
		3.1.3	Meningkatnya Sektor pariwisata kreatif melalui kemitraan dengan dunia usaha, dunia pendidikan, dan daerah sekitar	1. Meningkatkan keunggulan daya tarik wisata dan promosi wisata 2. Meningkatkan pariwisata melalui kemitraan dengan dunia usaha, dunia pendidikan, dan daerah sekitar 3. Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, kolaborasi dan Harmonisasi dengan Akademisi, Dunia Usaha, Komunitas kreatif, Pemerintah dan Media dalam pembangunan ekonomi kreatif di daerah.

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI
		3.1.4	Meningkatnya pengembangan usaha dan ketersediaan pangan masyarakat	1. Meningkatkan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan, dan penguatan cadangan, serta konsumsi pangan yang beragam  2. Meningkatkan partisipasi pemilik lahan pertanian untuk bergabung dalam LP2B, Pemberian insentif, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan sumber daya manusia
<b>MISI 4 : mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau <i>good governance</i> dan inovatif</b>				
4.1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan reformasi birokrasi	4.1.1	Terwujudnya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel	Implementasi reformasi birokrasi melalui penguatan 8 area perubahan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel
		4.1.2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	peningkatan kualitas pelayanan publik melalui transformasi pelayanan
		4.1.3	Meningkatnya pemanfaatan sistem informasi dan teknologi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan berbasis elektronik
4.2	Meningkatkan inovasi daerah	4.2.1	Meningkatnya pendayagunaan inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	Penguatan ekosistem inovasi guna meningkatkan pendayagunaan dan pengembangan IPTEK

Sumber: hasil analisis tahun 2020

Pelaksanaan pembangunan periode 2018-2023 merupakan tahap pembangunan lima tahunan keempat dari RPJPD yang memiliki tema **“Terpadunya sektor jasa dan pertanian, lembaga dan pranata, yang didukung IPTEK untuk mendorong perekonomian efisien dan produktifitas tinggi”**. Tema pembangunan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang lebih lanjut akan dijabarkan dalam tema pembangunan setiap tahun dan menjadi pedoman bagi penentuan fokus atau tema pembangunan dalam RKPD. Tema pembangunan lima tahunan dalam setiap periode RPJPD disajikan pada Gambar 6.1.



**Gambar 6.1**  
**Tema Pembangunan Lima Tahunan dalam RPJPD dan Penjabarannya ke RKPD**

Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Fokus pembangunan akan menjadi pedoman bagi pemerintah Daerah dalam menetapkan prioritas pembangunan tahunan selama 5 (lima) tahun ke depan sesuai periode RPJMD. Penerapan tema atau fokus tersebut memberi arah yang jelas bagi pemerintah Daerah setiap tahun dalam rangka pencapaian target pembangunan di RPJMD. Fokus pembangunan tahunan pemerintah Daerah

mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 disajikan pada Gambar 6.2 berikut ini.



**Gambar 6.2**  
**Tema atau Fokus Pembangunan Tahunan Periode 2018-2023**

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang telah dijabarkan dalam fokus atau tema pembangunan setiap tahun, maka dirumuskan arah kebijakan yang merupakan penjabaran dari strategi-strategi yang telah dirumuskan sebelumnya. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan serta merupakan rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah.

Arah kebijakan Pemerintah Daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 disajikan pada Tabel 6.2 dan 6.3 berikut ini.

**Tabel 6.2**  
**Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2019-2023**

Terwujudnya Kota Sukabumi yang Religius, Nyaman, dan Sejahtera						
MISI 1 : mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, dan berbudaya serta memiliki kesetiakawanan sosial yang tinggi berbasis ketahanan keluarga						
TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
1.1	Mewujudkan masyarakat berkualitas yang berakhlak mulia	1.1.1	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama, pemahaman wawasan kebangsaan, keamanan dan ketertiban masyarakat	Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui penerapan nilai nilai agama dan wawasan kebangsaan	1	Meningkatkan fasilitasi penguatan lembaga keagamaan
					2	Meningkatkan penguatan kapasitas kelompok masyarakat dan tokoh agama
					3	Meningkatkan aktivitas keagamaan
					4	Meningkatkan wawasan dan penerapan nilai-nilai agama dan Pancasila dalam kehidupan masyarakat
					5	Meningkatkan penegakan Perda dan penanganan pelanggaran peraturan Perda
					6	Meningkatkan antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban
		1.1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata	1	Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
					2	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam perilaku hidup sehat dan kesehatan lingkungan dalam rangka penanganan dan pemulihan pandemi covid-19
					3	Meningkatkan kualitas dan pemerataan SDM kesehatan
		1.1.3.	Meningkatnya ketersediaan layanan pendidikan yang bermutu dan merata	Meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu dan merata	1	Meningkatkan akses pelayanan pendidikan
					2	Meningkatkan tata kelola pendidikan yang berkualitas
					3	Meningkatkan kualitas dan pemerataan SDM pendidikan
					4	mewujudkan peserta didik yang berkualitas dan berkarakter

TUJUAN .....

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
		1.1.4.	Terwujudnya Masyarakat yang Kreatif dan Berbudaya	1. Meningkatkan Kolaborasi antar Stakeholders Penta Helix Dalam Pengembangan Kota Kreatif	1	Meningkatkan penguatan seni dan budaya lokal
					2	Meningkatkan Kreasi masyarakat
				2. Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan pemuda dan olah raga	3	Meningkatkan kualitas dan kuantitas olahraga prestasi serta partisipasi masyarakat dalam berolahraga
					4	Meningkatkan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
		1.1.5.	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak melalui penguatan kebijakan, kelembagaan , SDM dan Sistem Informasi Gender	1	Menyusun kebijakan terkait pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak
					2	Meningkatkan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak
					3	Meningkatkan Kapasitas SDM dan Pengembangan Sistem Informasi Gender
		1.1.6.	Meningkatnya ketahanan keluarga dan kesejahteraan sosial	Meningkatkan ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga melalui Penguatan Kebijakan, Pengendalian Penduduk dan ketahanan ekonomi keluarga	1	Menyusun Kebijakan terkait Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan sosial
					2	Optimalisasi ketahanan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga
				Meningkatkan pemberian pelayanan sosial dengan peran serta dan pemanfaatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	3	Mengembangkan sistem perlindungan sosial yang komprehensif dalam rangka penanggulangan kemiskinan kemiskinan bagi masyarakat miskin dan/ atau terdampak Covid-19
					4	Meningkatkan nilai-nilai kesetiakawanan Sosial melalui pemberdayaan masyarakat
					5	Meningkatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar yang holistik dan berkelanjutan

MISI 2 : mewujudkan tata ruang dan infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan						
TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
2.1	Mewujudkan Pembangunan tata ruang dan Infrastruktur yang Berkelanjutan	2.1.1	Terwujudnya pemerataan infrastruktur kota yang berkelanjutan	Mendorong terciptanya pemerataan dan peningkatan kualitas infrastruktur	1	Meningkatkan ketersediaan lahan untuk pembangunan infrastruktur diseluruh wilayah
					2	meningkatkan pembangunan infratraktur diwilayah yang tertingggal
					3	meningkatkan kualitas dan pemanfaatan pembangunan infrastruktur
				Mendorong percepatan legalisasi kebijakan infrastruktur dan penataan ruang	4	Menyesuaikan pembangunan infrastruktur dengan perencanaan tata ruang
					5	Menyusun peraturan-peraturan terkait pembangunan infrastruktur dan penataan ruang
					6	meningkatkan pengawasan pemanfaatan ruang
		2.1.4	Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas	Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup	1	meningkatkan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan
					2	meningkatkan pembangunan sanitasi dan pengendalian pencemaran
					3	meningkatkan penyediaan lahan pemerintah untuk kegiatan peningkatan kualitas lingkungan hidup
					4	meningkatkan kapasitas sdm sektor lingkungan hidup
		2.1.5	Terwujudnya ketangguhan terhadap bencana	Meningkatkan kapasitas penanganan bencana	1	meningkatkan sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana
					2	menyusun kebijakan dalam peningkatan kapasitas penanganan bencana
					3	Merubah paradigma penanggulangan bencana dari konsep emergency response menjadi preventive response

MISI 3 .....

MISI 3 : mewujudkan ekonomi Daerah yang maju bertumpu pada sektor perdagangan, ekonomi kreatif, dan pariwisata melalui prinsip kemitraan dengan dunia usaha, dunia pendidikan, dan daerah sekitar						
TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
3.1	Mewujudkan pengembangan ekonomi daerah yang kreatif dan berkelanjutan	3.1.1	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana pelayanan serta dukungan pembiayaan usaha dan peningkatan akses pasar	1	Meningkatkan Investasi dan Penanaman Modal di daerah
					2	Meningkatkan kualitas koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
					3	Meningkatkan informasi bursa tenaga kerja dan kualitas tenaga kerja
					4	Meningkatkan Kualitas Pendidikan Vokasi
					5	Mendukung terciptanya iklim usaha dan investasi yang kondusif
					6	Menciptakan Wirausaha muda Baru
					7	Mengembangkan Inkubator Bisnis khususnya dalam rangka pemulihan dampak pandemi covid-19
					8	Mengembangkan Produk unggulan daerah
		3.1.2	Meningkatnya peran perdagangan dalam stabilitas perekonomian melalui kemitraan dengan dunia usaha, dunia pendidikan, dan daerah sekitar	1. Meningkatkan kualitas Data, Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, dan sarana prasarana Perdagangan serta dukungan Teknologi dan Informasi	1	Meningkatkan kualitas sarana distribusi perdagangan
				2. Meningkatkan perdagangan melalui kemitraan dengan dunia usaha, dunia pendidikan, dan daerah sekitar	2	Penataan Pedagang kaki Lima (PKL)

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
		3.1.3	Meningkatnya Sektor pariwisata kreatif melalui kemitraan dengan dunia usaha, dunia pendidikan, dan daerah sekitar	1. Meningkatkan keunggulan daya tarik wisata dan promosi wisata	1	Mengembangkan destinasi pariwisata dan produk wisata
				2. Meningkatkan pariwisata melalui kemitraan dengan dunia usaha, dunia pendidikan, dan daerah sekitar	2	Meningkatkan promosi pariwisata unggulan Daerah berbasis wisata kuliner dan warisan budaya lokal melalui optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi
				3. Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, kolaborasi dan Harmonisasi dengan Akademisi, Dunia Usaha, Komunitas kreatif, Pemerintah dan Media dalam pembangunan ekonomi kreatif di daerah.	3	Peningkatan promosi pariwisata berbasis digital
					4	Meningkatkan dan Mengembangkan kualitas ekonomi kreatif
					5	Meningkatkan peran ABCGM (Academic, Business, Community, Government and Media) Bussines dalam pembangunan ekonomi kreatif di daerah
		3.1.4	Meningkatnya pengembangan usaha dan ketersediaan pangan masyarakat	1. Meningkatkan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan, dan penguatan cadangan, serta konsumsi pangan yang beragam	1	Menyediakan pangan berkualitas untuk mendukung konsumsi masyarakat yang Beragam, Bergizi, Sehat, dan Aman (B2SA)
				2. Meningkatkan partisipasi pemilik lahan pertanian untuk bergabung dalam LP2B, Pemberian insentif, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan sumber daya manusia	2	Meningkatkan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan secara berkelanjutan

MISI 4 : mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau <i>good governance</i> dan inovatif						
TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
4.1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan reformasi birokrasi	4.1.1	Terwujudnya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel	Implementasi reformasi birokrasi melalui penguatan 8 area perubahan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel	1	Perluasan implementasi sistem terintegritas
					2	Penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi
					3	Reformasi sistem perencanaan dan penganggaran
					4	Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas, transparan, dan akuntabel berbasis IT
		4.1.2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	peningkatan kualitas pelayanan publik melalui transformasi pelayanan	1	meningkatkan pelayanan publik berbasis elektronik khususnya di era pandemi covid-19
					2	penguatan pelayanan terpadu
					3	peningkatan profesionalisme ASN
					4	penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik
		4.1.3	Meningkatnya pemanfaatan sistem informasi dan teknologi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	1	Meningkatkan Integrasi Penerapan SPBE dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
					2	Meningkatkan Sumber Daya di Sektor SPBE
					3	Meningkatkan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat
					4	Optimalisasi Pemanfaatan Aplikasi SUPER (Sukabumi Participatory Responder)
4.2	Meningkatkan inovasi daerah	4.2.1	Meningkatnya pendayagunaan inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	Penguatan ekosistem inovasi guna meningkatkan pendayagunaan dan pengembangan IPTEK	1	Meningkatkan penelitian, pengkajian, dan pengembangan inovasi daerah melalui fasilitasi dan pendampingan
					2	Meningkatkan pengembangan jejaring di daerah, regional dan nasional
					3	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat serta kerjasama dengan akademisi
					4	Implementasi pemanfaatan inovasi

Sumber: hasil analisis tahun 2020

Tabel 6.3 .....

**Tabel 6.3**  
**Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2019-2023 per tahun**

NO.	Arah Kebijakan	Fokus / Tema				
		Kolaborasi membangun infrastruktur, inovasi perdagangan, dan jasa berbasis teknologi	Perbaikan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan, peningkatan ketaqwaan dan kesejahteraan masyarakat	Pemanfaatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan daya saing Daerah melalui percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan sistem kesehatan Daerah	Pemantapan daya saing daerah menuju kualitas kehidupan masyarakat yang unggul	Mencapai kualitas kehidupan masyarakat yang unggul dan sejahtera
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Meningkatkan fasilitasi penguatan lembaga keagamaan					
2	Meningkatkan penguatan kapasitas kelompok masyarakat dan tokoh agama					
3	Meningkatkan aktivitas keagamaan					
4	Meningkatkan wawasan dan penerapan nilai-nilai agama dan Pancasila dalam kehidupan masyarakat					
5	Meningkatkan penegakan Perda dan penanganan pelanggaran peraturan Perda					
6	Meningkatkan antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban					
7	Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan					

NO.	Arah Kebijakan	Fokus / Tema				
		Kolaborasi membangun infrastruktur, inovasi perdagangan, dan jasa berbasis teknologi	Perbaiki kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan, peningkatan ketaqwaan dan kesejahteraan masyarakat	Pemanfaatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan daya saing Daerah melalui percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan sistem kesehatan Daerah	Pemantapan daya saing daerah menuju kualitas kehidupan masyarakat yang unggul	Mencapai kualitas kehidupan masyarakat yang unggul dan sejahtera
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
8	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam perilaku hidup sehat dan kesehatan lingkungan dalam rangka penanganan dan pemulihan pandemi covid-19					
9	Meningkatkan kualitas dan pemerataan SDM kesehatan					
10	Meningkatkan akses pelayanan pendidikan					
11	Meningkatkan tata kelola pendidikan yang berkualitas					
12	Meningkatkan kualitas dan pemerataan SDM pendidikan					
13	mewujudkan peserta didik yang berkualitas dan berkarakter					
14	Meningkatkan penguatan seni dan budaya lokal					
15	Meningkatkan Kreasi masyarakat					

NO.	Arah Kebijakan	Fokus / Tema				
		Kolaborasi membangun infrastruktur, inovasi perdagangan, dan jasa berbasis teknologi	Perbaikan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan, peningkatan ketaqwaan dan kesejahteraan masyarakat	Pemanfaatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan daya saing Daerah melalui percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan sistem kesehatan Daerah	Pemantapan daya saing daerah menuju kualitas kehidupan masyarakat yang unggul	Mencapai kualitas kehidupan masyarakat yang unggul dan sejahtera
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
16	Meningkatkan kualitas dan kuantitas olahraga prestasi serta partisipasi masyarakat dalam berolahraga					
17	Meningkatkan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan					
18	Menyusun kebijakan terkait pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak					
19	Meningkatkan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak					
20	Meningkatkan Kapasitas SDM dan Pengembangan Sistem Informasi Gender					
21	Menyusun Kebijakan terkait Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan sosial					
22	Optimalisasi ketahanan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga					

NO.	Arah Kebijakan	Fokus / Tema				
		Kolaborasi membangun infrastruktur, inovasi perdagangan, dan jasa berbasis teknologi	Perbaikan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan, peningkatan ketaqwaan dan kesejahteraan masyarakat	Pemanfaatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan daya saing Daerah melalui percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan sistem kesehatan Daerah	Pemantapan daya saing daerah menuju kualitas kehidupan masyarakat yang unggul	Mencapai kualitas kehidupan masyarakat yang unggul dan sejahtera
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
23	Mengembangkan sistem perlindungan sosial yang komprehensif dalam rangka penanggulangan kemiskinan kemiskinan bagi masyarakat miskin dan/ atau terdampak Covid-19					
24	Meningkatkan nilai-nilai kesetiakawanan Sosial melalui pemberdayaan masyarakat					
25	Meningkatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar yang holistik dan berkelanjutan					
26	Meningkatkan ketersediaan lahan untuk pembangunan infrastruktur diseluruh wilayah					
27	meningkatkan pembangunan infratraktur diwilayah yang tertinggal					
28	meningkatkan kualitas dan pemanfaatan pembangunan infrastruktur					

NO.	Arah Kebijakan	Fokus / Tema				
		Kolaborasi membangun infrastruktur, inovasi perdagangan, dan jasa berbasis teknologi	Perbaikan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan, peningkatan ketaqwaan dan kesejahteraan masyarakat	Pemanfaatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan daya saing Daerah melalui percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan sistem kesehatan Daerah	Pemantapan daya saing daerah menuju kualitas kehidupan masyarakat yang unggul	Mencapai kualitas kehidupan masyarakat yang unggul dan sejahtera
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
29	Menyesuaikan pembangunan infrastruktur dengan perencanaan tata ruang					
30	Menyusun peraturan-peraturan terkait pembangunan infrastruktur dan penataan ruang					
31	meningkatkan pengawasan pemanfaatan ruang					
32	meningkatkan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan					
33	meningkatkan pembangunan sanitasi dan pengendalian pencemaran					
34	meningkatkan penyediaan lahan pemerintah untuk kegiatan peningkatan kualitas lingkungan hidup					
35	meningkatkan kapasitas sdm sektor lingkungan hidup					
36	meningkatkan sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana					

NO.	Arah Kebijakan	Fokus / Tema				
		Kolaborasi membangun infrastruktur, inovasi perdagangan, dan jasa berbasis teknologi	Perbaikan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan, peningkatan ketaqwaan dan kesejahteraan masyarakat	Pemanfaatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan daya saing Daerah melalui percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan sistem kesehatan Daerah	Pemantapan daya saing daerah menuju kualitas kehidupan masyarakat yang unggul	Mencapai kualitas kehidupan masyarakat yang unggul dan sejahtera
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
37	menyusun kebijakan dalam peningkatan kapasitas penanganan bencana					
38	Merubah paradigma penanggulangan bencana dari konsep emergency response menjadi preventive response					
39	Meningkatkan Investasi dan Penanaman Modal di daerah					
40	Meningkatkan kualitas koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)					
41	Meningkatkan informasi bursa tenaga kerja dan kualitas tenaga kerja					
42	Meningkatkan Kualitas Pendidikan Vokasi					
43	Mendukung terciptanya iklim usaha dan investasi yang kondusif					
44	Menciptakan Wirausaha muda Baru					

NO.	Arah Kebijakan	Fokus / Tema				
		Kolaborasi membangun infrastruktur, inovasi perdagangan, dan jasa berbasis teknologi	Perbaikan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan, peningkatan ketaqwaan dan kesejahteraan masyarakat	Pemanfaatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan daya saing Daerah melalui percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan sistem kesehatan Daerah	Pemantapan daya saing daerah menuju kualitas kehidupan masyarakat yang unggul	Mencapai kualitas kehidupan masyarakat yang unggul dan sejahtera
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
45	Mengembangkan Inkubator Bisnis khususnya dalam rangka pemulihan dampak pandemi covid-19					
46	Mengembangkan Produk unggulan daerah					
47	Meningkatkan kualitas sarana distribusi perdagangan					
48	Penataan Pedagang kaki Lima (PKL)					
49	Mengembangkan destinasi pariwisata dan produk wisata					
50	Meningkatkan promosi pariwisata unggulan Daerah berbasis wisata kuliner dan warisan budaya lokal melalui optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi					
51	Peningkatan promosi pariwisata berbasis digital					
52	Meningkatkan dan Mengembangkan kualitas ekonomi kreatif					

NO.	Arah Kebijakan	Fokus / Tema				
		Kolaborasi membangun infrastruktur, inovasi perdagangan, dan jasa berbasis teknologi	Perbaikan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan, peningkatan ketaqwaan dan kesejahteraan masyarakat	Pemanfaatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan daya saing Daerah melalui percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan sistem kesehatan Daerah	Pemantapan daya saing daerah menuju kualitas kehidupan masyarakat yang unggul	Mencapai kualitas kehidupan masyarakat yang unggul dan sejahtera
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
53	Meningkatkan peran ABCGM (Academic, Business, Community, Government and Media) Bussines dalam pembangunan ekonomi kreatif di daerah					
54	Menyediakan pangan berkualitas untuk mendukung konsumsi masyarakat yang Beragam, Bergizi, Sehat, dan Aman (B2SA)					
55	Meningkatkan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan secara berkelanjutan					
56	Perluasan implementasi sistem terintegritas					
57	Penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi					
58	Reformasi sistem perencanaan dan penganggaran					

NO.	Arah Kebijakan	Fokus / Tema				
		Kolaborasi membangun infrastruktur, inovasi perdagangan, dan jasa berbasis teknologi	Perbaikan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan, peningkatan ketaqwaan dan kesejahteraan masyarakat	Pemanfaatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan daya saing Daerah melalui percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan sistem kesehatan Daerah	Pemantapan daya saing daerah menuju kualitas kehidupan masyarakat yang unggul	Mencapai kualitas kehidupan masyarakat yang unggul dan sejahtera
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
59	Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas, transparan, dan akuntabel berbasis IT					
60	meningkatkan pelayanan publik berbasis elektronik khususnya di era pandemi covid-19					
61	penguatan pelayanan terpadu					
62	peningkatan profesionalisme ASN					
63	penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik					
64	Meningkatkan Integrasi Penerapan SPBE dalam Penyelenggaraan Pemerintahan					
65	Meningkatkan Sumber Daya di Sektor SPBE					
66	Meningkatkan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat					
67	Optimalisasi Pemanfaatan Aplikasi SUPER (Sukabumi Participatory Responder)					

NO.	Arah Kebijakan	Fokus / Tema				
		Kolaborasi membangun infrastruktur, inovasi perdagangan, dan jasa berbasis teknologi	Perbaikan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan, peningkatan ketaqwaan dan kesejahteraan masyarakat	Pemanfaatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan daya saing Daerah melalui percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan sistem kesehatan Daerah	Pemantapan daya saing daerah menuju kualitas kehidupan masyarakat yang unggul	Mencapai kualitas kehidupan masyarakat yang unggul dan sejahtera
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
68	Meningkatkan penelitian, pengkajian, dan pengembangan inovasi daerah melalui fasilitasi dan pendampingan					
69	Meningkatkan pengembangan jejaring di daerah, regional dan nasional					
70	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat serta kerjasama dengan akademisi					
71	Implementasi pemanfaatan inovasi					

Sumber : Hasil Analisis Bappeda (2020)

## **6.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DENGAN PENDEKATAN SPASIAL**

Pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam penyusunan RPJMD. Penerapan pendekatan spasial ini dilakukan dengan memperhatikan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi.

Pada dasarnya Tujuan penataan ruang wilayah kota merupakan arahan perwujudan ruang wilayah kota yang ingin dicapai pada masa yang akan datang. Tujuan penataan ruang wilayah kota memiliki fungsi :

- a. sebagai dasar untuk menformulasikan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota;
- b. memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW kota; dan;
- c. sebagai dasar dalam penetapan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.

### **6.2.1. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kota**

Kebijakan penetapan struktur ruang wilayah Daerah meliputi:

1. perwujudan pusat kegiatan yang memperkuat kegiatan pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa, pariwisata dan kegiatan kota lainnya secara optimal;
2. peningkatan aksesibilitas dan transportasi yang dapat mengarahkan peningkatan fungsi dan keterkaitan antar pusat kegiatan dan sistem sirkulasi kota yang optimal;
3. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana yang dapat mendorong perkembangan kegiatan dan perbaikan lingkungan permukiman kota.

Strategi penetapan struktur ruang wilayah Daerah meliputi:

1. strategi perwujudan pusat kegiatan yang memperkuat kegiatan pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa, pariwisata dan kegiatan kota lainnya secara optimal;
2. strategi peningkatan aksesibilitas dan transportasi yang dapat mengarahkan peningkatan fungsi dan keterkaitan antar pusat kegiatan dan sistem sirkulasi kota yang optimal, menentukan hierarki pusat kegiatan pelayanan skala regional dan lokal meliputi pusat kegiatan pelayanan dan komersial dan pusat kegiatan wisata;
3. strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana yang dapat mendorong perkembangan kegiatan dan terwujudnya lingkungan permukiman kota yang nyaman dan aman.

Pusat-pusat Pelayanan yang direncanakan di Daerah meliputi:

1. Pusat Pelayanan Kota (PPK), Pusat pelayanan Daerah ditetapkan di 2 lokasi yaitu pusat kota di Kecamatan Cikole dan Kecamatan Cibeureum. Pusat pelayanan kota berfungsi sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala regional dan pusat pemerintahan. Pusat pelayanan kota yang direncanakan sampai dengan tahun 2039 adalah Pusat Pelayanan Pusat Kota Cikole dan Cibeureum. Pusat Pelayanan Pusat Kota melayani Sub Wilayah Kota (SWK) Utara, sedangkan Pusat pelayanan Babakan melayani Sub Wilayah Kota (SWK) Selatan;
2. Sub Pusat Pelayanan Kota (SPK), Sub pusat pelayanan kota terdiri 5 (lima) sub pusat pelayanan kota yang dikembangkan yaitu : Kelurahan Lembursitu Kecamatan Lembursitu, Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong, Kelurahan Sudajaya Hilir Kecamatan Baros, Kelurahan Citamiang Kecamatan Citamiang, dan Kelurahan Gunungpuyuh Kecamatan Gunungpuyuh. Pengembangan sub pusat kota berfungsi sebagai penyangga dua pusat pelayanan kota, dan meratakan pelayanan pada skala bagian wilayah kota. Penyebaran sub pusat pelayanan kota juga dimaksudkan

untuk .....

untuk mendukung keserasian perkembangan kegiatan pembangunan antar bagian wilayah kota;

3. Pusat Lingkungan (PL), Pusat lingkungan diarahkan pengembangannya di pusat-pusat pelayanan pemerintahan skala kelurahan. Pusat lingkungan diarahkan minimal mempunyai fungsi-fungsi pelayanan skala lingkungan/kelurahan agar dapat memberikan pelayanan pada lingkungan sekitarnya secara optimal.

### **6.2.2. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pola Ruang Wilayah Kota**

Kebijakan pengembangan pola ruang wilayah Daerah meliputi:

1. pelestarian kawasan lindung terutama di daerah sempadan sungai dan wilayah utara Daerah untuk keberlanjutan lingkungan Daerah;
2. pengendalian kegiatan budidaya yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan;
3. pengembangan kawasan permukiman yang berwawasan lingkungan dan mitigasi bencana;
4. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

Strategi Pelestarian kawasan lindung terutama di daerah sempadan sungai dan wilayah utara Daerah untuk keberlanjutan lingkungan Daerah meliputi :

1. kerjasama dengan Kabupaten Sukabumi untuk penyelamatan ekosistem sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku guna menjaga keberlangsungan lingkungan untuk sumber air bersih;
2. melestarikan daerah resapan air untuk menjaga ketersediaan sumberdaya air;
3. membatasi kegiatan di kawasan perlindungan setempat sepanjang sungai hanya untuk kepentingan pariwisata yang tidak merubah fungsi lindung;
4. mengelola kawasan lindung secara terpadu;

5. melakukan .....

5. melakukan konservasi tanah dan air pada kawasan lindung;
6. mempertahankan dan merevitalisasi kawasan-kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air dan kesuburan tanah serta melindungi kawasan dari bahaya longsor dan erosi;
7. menyelamatkan keutuhan potensi keanekaragaman hayati, baik potensi fisik wilayahnya (habitatnya), potensi sumberdaya kehidupan serta keanekaragaman sumber genetiknya;
8. meningkatkan kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau hingga 30 % dari luas wilayah Kota dalam mengendalikan dan memelihara kualitas lingkungan.

Strategi Pengendalian kegiatan budidaya yang dapat menimbulkan kerusakan atau penurunan kualitas lingkungan meliputi :

1. mengendalikan perkembangan pusat-pusat kegiatan agar tetap terjadi keseimbangan perkembangan antar wilayah;
2. mengembangkan kawasan budidaya terbangun secara vertikal di kawasan pusat kota;
3. mengembangkan ruang-ruang kawasan yang kompak dan efisien dengan sistem insentif dan disinsentif;
4. mengendalikan kegiatan industri yang tidak menimbulkan polusi dan kerusakan lingkungan.

Strategi pengembangan kawasan permukiman yang berwawasan lingkungan dan sesuai dengan daya dukung lingkungan meliputi :

1. menata pemanfaatan ruang terbangun pada pusat kegiatan secara merata untuk mencegah kawasan permukiman padat;
2. pembangunan perkotaan harus didasarkan pada DDL/DTL;
3. melarang untuk membangun di kawasan yang memiliki potensi terjadi rawan bencana longsor dan bencana alam;

4. mengintensifikasi dan ekstensifikasi ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau melalui kegiatan pembangunan baru, pemeliharaan, dan pengamanan ruang terbuka hijau;
5. menata ruang untuk kegiatan perdagangan, perumahan, pertanian, dan pengembangan obyek wisata yang saling bersinergi;
6. mengembangkan lingkungan permukiman dengan kepadatan rendah di wilayah yang termasuk pada daerah rentan bencana;
7. meremajakan dan merehabilitasi lingkungan perumahan yang menurun kualitasnya, dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan.

Strategi untuk peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara, meliputi:

1. mengembangkan kegiatan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan dengan kawasan budi daya terbangun;
2. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan/ Lemdikpol Setukpa POLRI.

### **6.2.3. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Strategis Wilayah Kota.**

Kebijakan pengembangan kawasan strategis meliputi:

1. penguatan kawasan strategis sosial budaya;
2. peningkatan daya saing investasi dan kesempatan ekonomi pada kawasan strategis ekonomi;
3. penguatan keseimbangan ekologis pada kawasan strategis lingkungan hidup.

Strategi Penguatan kawasan strategi sosial budaya, meliputi :

1. mengembangkan kawasan pusat pendidikan tinggi skala regional; dan

2. mengembangkan .....

2. mengembangkan kawasan pusat perkantoran pemerintahan dalam rangka meningkatkan pelayanan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Strategi Peningkatan daya saing investasi dan kesempatan ekonomi kawasan strategis ekonomi meliputi:

1. mengembangkan kegiatan budidaya unggulan;
2. pengembangan Kawasan Agrowisata dan kawasan pariwisata yang terpadu sebagai daya tarik dan obyek wisata;
3. pengembangan ruang untuk sektor informal;
4. mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budi daya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan wilayah;
5. memberikan insentif dan stimulan untuk mempercepat perwujudan kawasan strategis berupa peningkatan pelayanan sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi;

Strategi penguatan keseimbangan ekologis pada kawasan strategis lingkungan hidup, meliputi :

1. membatasi pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar kawasan strategis lingkungan hidup yang dapat memicu perkembangan kegiatan budidaya;
2. mengembangkan kegiatan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis kota yang berfungsi sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan lindung dengan kawasan budi daya terbangun;
3. meningkatkan keanekaragaman hayati kawasan lindung;
4. merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar kawasan strategis.

#### **6.2.3.1. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi**

Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi yaitu Pusat Perekonomian Cibeureum. Kegiatan perekonomian kota yang menjadi pemicu utama pertumbuhan ekonomi di Daerah adalah kegiatan perdagangan dan jasa. Daerah memiliki rencana untuk membuat pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah Kecamatan Cibeureum, Kelurahan Cibeureum hilir dengan pengembangan kawasan sekitar stasiun baru di Cibeureum dengan konsep TOD (*Transit Oriented Development*). Pengembangan di kawasan ini untuk pelayanan jasa dan perdagangan skala kota regional, selain itu dikembangkannya kawasan perdagangan dan jasa di kawasan ini menunjang terhadap pengembangan kawasan pendidikan dan kawasan perkantoran pemerintah yang dikembangkan pada bagian lain di Kecamatan Cibeureum.

#### **6.2.3.2. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial dan Budaya**

Kawasan pusat Daerah merupakan pusat kegiatan utama untuk perdagangan dan jasa di Daerah, Konsep pengembangan kawasan ini adalah *urban renewal* dengan tetap mempertahankan fungsi kawasan sebagai pusat perekonomian kota dan mempertahankan nilai sejarah kawasan pusat kota dimana dicirikan adanya bangunan-bangunan yang termasuk dalam *heritage*, walaupun pada saat ini ada bangunan-bangunan yang sudah tidak ada. Dengan ditetapkannya sebagai kawasan strategis sosial budaya diharapkan kawasan ini dapat tetap berkembang dengan mempertahankan bangunan-bangunan *heritage* yang masih ada. Pengembangan kawasan ini antara lain meliputi penataan dan relokasi pedagang kaki lima, penataan bangunan dan lingkungan terkait fasilitas pejalan kaki dan parkir kendaraan.

#### **6.2.3.3. Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup**

Kawasan Strategis Kota (KSK) berdasarkan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di Daerah yaitu berupa Kawasan Ekowisata Cikundul. Di

Kecamatan Cikundul terdapat beberapa lokasi terkait untuk pengembangan wisata, yaitu KAC (Kawasan Agroeduwisata Cikundul), pemandian air panas Cikundul, Hutan Kota Kibitay. Konsep kawasan wisata ini bisa dipadukan dengan membentuk Koridor Wisata Baros – Lembursitu - Warudoyong, dengan Sungai Cimandiri – Cipelang – Cigunung sebagai arterinya. Kesemuanya dikemas dalam balutan Kawasan Wisata Cimandiri. Pengembangan sektor pariwisata ini akan menjadi sumber pemasukan bagi Daerah. Pengembangan sektor wisata ini menjadi sangat penting karena terkait dengan aksesibilitas yang mudah menuju Daerah dengan adanya Tol Bocimi, jalur ganda kereta api dan pembangunan bandara di Kabupaten Sukabumi.

### **6.3. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018-2023**

Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan dasar bagi penentuan prioritas pembangunan Daerah. Prioritas pembangunan Daerah menjadi pelaksana dari arah kebijakan yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana waktu pelaksanaan. Prioritas pembangunan Daerah disajikan selama 5 (lima) tahun mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 berdasarkan sasaran RPJMD. Prioritas pembangunan daerah bersifat strategis, maka penganggaran dan pelaksanaannya diutamakan. Penentuan prioritas pembangunan Daerah juga merupakan bentuk pelaksanaan program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Terdapat 5 (lima) prioritas pembangunan yang telah ditetapkan, namun akibat adanya pandemi covid-19 maka ditambahkan 1(satu) prioritas pembangunan guna mempercepat penanganan dan pemulihan akibat pandemi covid-19. Prioritas pembangunan jangka menengah Daerah Tahun 2018-2023, meliputi:

1. peningkatan sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas dan berakhlak mulia;
2. peningkatan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan implementasi reformasi birokrasi yang inovatif berbasis teknologi informasi;

3. Peningkatan .....

3. peningkatan pemenuhan pelayanan dasar untuk kesejahteraan masyarakat;
4. peningkatan dukungan infrastruktur untuk pembangunan;
5. pengembangan ekonomi yang berkelanjutan; dan
6. penanganan dan pemulihan dampak pandemi covid-19.

Prioritas pembangunan jangka menengah Daerah tersebut dilaksanakan melalui program dan kegiatan unggulan yang meliputi:

**1. Peningkatan sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas dan berakhlak mulia**

**a. Program Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama**

Pencapaian Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi Tahun 2018 – 2023 khususnya untuk mewujudkan pilar religius dapat dicapai dengan melaksanakan amanah misi pertama yaitu mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif dan berbudaya serta memiliki kesetiakawanan sosial yang tinggi berbasis ketahanan keluarga.

Tujuan misi pertama khususnya dalam mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia adalah untuk mewujudkan pemerintahan, masyarakat dan pelaku usaha yang baik dalam melaksanakan kehidupan beragama.

Untuk merealisasikan pencapaian tujuan misi pertama khususnya dalam mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia direncanakan oleh perangkat daerah melalui program rutin dan program inovasi perangkat daerah yaitu:

a) Program peningkatan kualitas lembaga keagamaan

Dengan kegiatan antara lain melalui peningkatan kualitas manajemen, peningkatan fasilitas keagamaan, peningkatan kualitas SDM dan peningkatan basis ekonomi.

b) Program gerakan magrib mengaji

Adalah program pemerintah dalam meningkatkan syiar keagamaan serta ketaqwaan, yang dahulu sudah menjadi kebiasaan masyarakat namun dikhawatirkan terjadi perubahan pola perilaku dan sikap di tengah masyarakat.

c) Program gerakan subuh berjamaah

Adalah untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Sasaran program adalah masyarakat dan Aparatur Sipil Negara untuk dapat hadir setiap Jumat subuh di Masjid Agung dan Ahad subuh berjamaah di Masjid Al- Ikhlas di lingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Sukabumi dan di Masjid atau Mushola di lingkungan masyarakat sekitar.

d) Program pembiasaan akhlakul karimah

Akhlak memiliki peranan penting dalam membangun hubungan. Akhlak yang baik akan memancarkan energi positif yang bersumber dari yang Maha. Akhlak merupakan hasil dari pengetahuan, sikap dan prilaku yang dilatih terus menerus. Ruang lingkup program ini adalah pembiasaan dalam hubungan manusia dan dirinya, hubungan manusia dengan Tuhan-nya, hubungan manusia dengan sesamanya dan manusia dengan lingkungannya.

e) Program peningkatan toleransi

Setiap masyarakat memiliki kebebasan dan mengamalkan agama yang dianutnya. Memiliki pengetahuan dan pemahaman dalam keberagaman merupakan hal penting dalam menjaga modal sosial. Komunikasi yang intens dan berkualitas adalah strategi utama dalam mewujudkan kualitas toleransi. Ruang lingkup toleransi mencakup hubungan struktural sosial dan kultural sosial untuk membangun kebersamaan dan keberagaman dalam nilai-nilai universal.

f) Program *family straightening* (pelatihan pranikah, pelatihan parenting, konseling keluarga)

Keluarga adalah lingkup sosial terkecil dan awal terbentuknya ikatan sosial, struktur sosial yang terbanyak adalah keluarga. Keluarga juga menjadi pembangun struktur sosial yang besar, sehingga untuk memiliki struktur sosial yang kuat dan berkarakter maka keluarga salah satu pintu strategis untuk melakukan perubahan. Keluarga menjadi objek dari program ini dengan ruang lingkup saat akan mengikat keluarga (pra nikah) dan saat membangun keluarga (pasca menikah). Arah program ini adalah bagaimana sebelum menikah memiliki pengetahuan, sikap dan nilai

yang.....

yang luhur dalam berkeluarga. Saat sudah menikah memiliki sikap dan prilaku membangun “rumah ku, surga ku” sehingga keluarga adalah tempat yang menyenangkan untuk setiap anggota keluarga, dan ketika ada permasalahan keluarga memiliki kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan dengan akhlak dan nilai yang baik.

g) Program promosi kota halal *friendly*

Kota merupakan arena pertemuan dari semua strata sosial, Kota Sukabumi memiliki koneksi langsung dengan wilayah rural (pedesaan) dan wilayah urban (perkotaan). Arena kota menjadi pertemuan nilai-nilai rural dan urban, dengan kondisi seperti itu maka kota harus menjadi penjaga nilai yang kuat, nilai yang kuat berasal dari nilai “Ilah” yang diturunkan dalam ranah sosial kemasyarakatan. Ruang lingkup sandang, pangan dan papan merupakan arena dari program ini.

**b. Program Peningkatan Literasi**

Program Peningkatan Literasi merupakan program untuk mengembangkan budaya literasi, mengajak warga untuk semakin gemar membaca dengan mengadakan acara-acara menarik di Daerah yang dilaksanakan oleh penggerak perpustakaan keliling.

**c. Uduan Online di dukung oleh Forum Silih Asih Silih Asuh**

Forum Silih Asih Silih Asuh atau Uduan *Online*, merupakan program untuk mendorong kesetiakawanan warga kota untuk saling membantu, silih asih silih asuh dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di tengah masyarakat. Hal ini dilakukan karena Pemerintah Daerah memiliki keterbatasan secara kewenangan maupun secara anggaran sehingga masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi untuk berkontribusi secara langsung.

Pemerintah mendorong secara optimal kepedulian masyarakat serta kesetiakawanan sosial. Hal ini penting dilakukan karena dengan dua prinsip tersebut masyarakat diajak untuk terbiasa dengan model partisipatif dalam bermasyarakat. Partisipasi jelas diperlukan dalam menumbuh kembangkan kemajuan kota tempat tinggalnya.

Mekanisme *online* digunakan dalam program ini adalah untuk mendorong prinsip transparansi serta kecepatan dalam pelaksanaannya. Selain itu melalui program ini, masyarakat perkotaan yang telah relatif terbiasa dengan iklim digitalisasi akan mendapatkan kemudahan dalam berpartisipasi serta ikut peduli dengan anggota masyarakat kota lainnya yang tengah dalam kondisi kesulitan.

**d. Program *Students Camp***

Program *Students Camp*, merupakan program pendidikan holistik yang bertujuan melakukan pembentukan karakter bagi siswa SMP, SMA dan SMK sederajat. Program ini diharapkan akan melahirkan pelajar-pelajar yang dapat berperan sebagai agen-agen perubahan ke arah yang lebih baik di lingkungannya. Program ini dirancang untuk memperkaya para peserta dengan pelatihan-pelatihan yang merangsang pertumbuhan jiwa kepemimpinan dan wawasan pengetahuan lingkungan para peserta.

Perlu kiranya diketahui bahwa program ini titik tolaknya ada pada bagaimana melakukan pelatihan pada siswa-siswa pilihan yang dianggap memiliki kemampuan untuk menyebarkan nilai-nilai yang baik bagi siswa-siswa lainnya dari hasil pelatihan.

Pelatihan ini diharapkan untuk membangun rasa persaudaraan antar para pelajar di Daerah, sehingga diharapkan mampu menekan dan meredusir masalah-masalah kenakalan pelajar serta berbagai perilaku negatif lainnya.

**2. Peningkatan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan implementasi reformasi birokrasi yang inovatif berbasis teknologi informasi**

**Program *Sukabumi Participatory Responder* atau *SUPER***, merupakan sebuah aplikasi resmi milik Pemerintah Daerah yang terintegrasi langsung dengan e-LAPOR yang menawarkan kemudahan bagi warga untuk berinteraksi dengan Pemerintah Daerah baik untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, pengaduan atas pelayanan publik, pertanyaan, dan lain sebagainya.

### **3. Peningkatan pemenuhan pelayanan dasar untuk kesejahteraan masyarakat**

#### **a. Program Optimalisasi Puskesmas**

Program Optimalisasi Puskesmas, merupakan program untuk peningkatan mutu dan layanan Puskesmas di setiap kecamatan dengan menyediakan dokter spesialis, peralatan medis, layanan peserta BPJS nonstop 24 jam, dan ambulan SIGAP. Dengan tambahan satu perawat di setiap kelurahan atau *home care* sebagai salah satu upaya untuk mengantisipasi pelayanan warga yang memerlukan pengobatan, pertolongan medis di setiap kecamatan agar terhindar dari penumpukan pasien di RSUD sehingga pelayanan dapat dilakukan lebih optimal.

Program ini turut mengimbangi pertumbuhan Daerah yang cukup signifikan. Kebutuhan penduduk perkotaan yang terus bertambah dari sisi kuantitas penduduk menuntut perimbangan dari sisi kualitas dan fasilitas sebuah kota. Khusus di bidang kesehatan, program ini diupayakan pemerintah untuk mendorong perimbangan itu terjadi serta upaya optimalisasi.

Program ini dirancang dengan basis puskesmas di setiap kewilayahan, sehingga pemerataan pelayanan kesehatan diharapkan dapat mengalami peningkatan. Daerah memiliki harapan bahwa peningkatan ini tidak hanya berdampak bagi peningkatan pelayanan kesehatan saja namun juga berdampak pada peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Daerah secara lebih menyeluruh.

#### **b. Program Rumah Singgah**

Pencapaian Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi Tahun 2018 – 2023 khususnya untuk mewujudkan pilar sejahtera dapat dicapai dengan melaksanakan amanah misi pertama yaitu mewujudkan masyarakat yang berahlak mulia, sehat, cerdas, kreatif dan berbudaya serta memiliki kesetiakawanan sosial yang tinggi berbasis ketahanan keluarga.

Tujuan Misi pertama khususnya dalam mewujudkan masyarakat yang berkualitas adalah untuk mewujudkan masyarakat

yang dapat memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri dan memenuhi kebutuhan menjaga kesehatan secara rutin.

Untuk merealisasikan pencapaian tujuan misi pertama khususnya dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan sehat direncanakan oleh perangkat daerah melalui program rutin dan program inovasi perangkat daerah salah satunya yaitu program unggulan rumah singgah.

Program rumah singgah merupakan program untuk menyediakan rumah singgah dan tenaga administrasinya bagi masyarakat yang tidak mampu untuk memeriksakan kesehatan, pengobatan dan perawatan medis setelah dirujuk ke Rumah Sakit di sekitar Kota Bandung.

Program ini dirancang dengan tujuan untuk mengurangi beban dan memudahkan masyarakat Daerah ketika harus memenuhi kebutuhan pengobatan ke rumah sakit rujukan di Kota Bandung khususnya RS Hasan Sadikin. Kesulitan-kesulitan yang sering timbul akibat lokasi pengobatan jauh dari tempat tinggalnya dan tidak mampu untuk membiayainya.

Dengan adanya rumah singgah yang disertai tenaga administrasi maka fungsi fasilitas ini tidak hanya sebagai tempat tinggal sementara saja bagi pasien yang hendak merujuk namun hal-hal yang biasanya menjadi kesulitan khususnya persoalan administratif pada rumah sakit rujukan dapat ditanggulangi dengan baik.

**c. Kelurahan Sport Center,**

*Kelurahan Sport Center* merupakan program penyediaan ruang terbuka publik dan fasilitas olahraga yang berkualitas di setiap kelurahan.

**4. Peningkatan dukungan infrastruktur untuk pembangunan**

**a. Program Revitalisasi Pedestrian**

Pencapaian Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi Tahun 2018 – 2023 khususnya untuk mewujudkan pilar nyaman dapat dicapai dengan melaksanakan amanah misi kedua yaitu

mewujudkan.....

mewujudkan tata ruang dan infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.

Tujuan misi kedua khususnya dalam mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan adalah untuk mewujudkan kenyamanan bagi pedestrian (orang yang menggunakan fasilitas trotoar).

Untuk merealisasikan pencaian tujuan misi kedua khususnya dalam mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan direncanakan oleh perangkat daerah melalui program rutin dan program inovasi perangkat daerah salah satunya yaitu program unggulan revitalisasi pedestrian.

Program unggulan revitalisasi pedestrian yaitu merupakan konsep penataan integrasi kawasan lapang merdeka sehingga dapat menjadi ruang terbuka publik yang lebih nyaman serta dapat menjadi salah satu *landmark* kota; selain kawasan terintegrasi lapang merdeka dan alun-alun juga diprioritaskan untuk revitalisasi pedestrian lainnya yang dapat merubah wajah Daerah atau dilokasi – lokasi pintuk masuk Daerah.

## **5. Pengembangan ekonomi yang berkelanjutan**

### **a. Program Sukabumi *KECE***

Pencapaian Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi Tahun 2018 – 2023 khususnya untuk mewujudkan pilar sejahtera dapat dicapai dengan melaksanakan amanah misi ketiga yaitu mewujudkan ekonomi daerah yang maju bertumpu pada sektor perdagangan, ekonomi kreatif dan pariwisata melalui prinsip kemitraan dengan dunia usaha, dunia pendidikan dan daerah sekitar.

Tujuan misi ketiga khususnya dalam mewujudkan ekonomi daerah yang maju bertumpu pada sektor ekonomi kreatif. Untuk merealisasikan pencaian tujuan misi ketiga tersebut, direncanakan oleh perangkat daerah melalui program rutin dan program inovasi perangkat daerah salah satunya yaitu dengan program unggulan Sukabumi Kece.

Program unggulan Sukabumi Kece merupakan program pemberdayaan anak muda melalui pelatihan dan pendampingan wira

usaha baru, sehingga terbentuk wira usaha baru dengan jenis bidang usaha tertentu.

**b. Program Kredit Anyelir**

Program Kredit Anyelir merupakan program bantuan permodalan yang terintegrasi dengan program Sukabumi Kece, diberikan kepada wirausaha baru atau WUB yang telah dinyatakan lulus pelatihan.

**c. Program *Little Sukabumi***

Program *Little Sukabumi* merupakan program pusat layanan informasi, promosi, pusat belanja, dan *display* produk unggulan Daerah yang bersinergi dengan daerah lain yang berfungsi sebagai potensi pasar bagi produk unggulan Daerah.

**d. Program *Sukabumi Creative Hub***

Program *Sukabumi Creative Hub* merupakan program pembangunan ruang kreasi bagi warga dengan menyediakan studio foto, televisi, *fashion*, ruang ICT, galeri seni, serta bioskop mini untuk pemutaran film karya anak bangsa, ruang belajar, kafetaria, radio komunitas anak muda, studio rekaman, dan lain sebagainya.

**e. Program Pendidikan Vokasi**

Program Pendidikan Vokasi, merupakan program pendidikan yang berorientasi kepada penguasaan keahlian tertentu atau vokasi yang relevan dengan dunia kerja dan usaha.

Sesuai dengan amanat undang-undang bahwa salah satu kualifikasi penyelenggaraan pendidikan nasional di Indonesia adalah pendidikan vokasi, dimana kualifikasi pendidikan ini menekankan pada penguasaan keahlian terapan tertentu.

Dalam program ini dirancang untuk lebih dapat menyalurkan para calon tenaga kerja lulusan pendidikan vokasi untuk dapat bekerja sesuai dengan keahlian yang dipelajarinya di masa sekolah. Titik beratnya ada pada upaya pemerintah untuk mempertemukan para lulusan pendidikan vokasi dengan dunia kerja. Daya serap bagi

para.....

para lulusan pendidikan vokasi ini didorong dengan mengadakan dan menciptakan ruang komunikasi yang lebih intens berupa kegiatan-kegiatan bursa kerja.

Diharapkan dengan upaya dan banyaknya ruang komunikasi yang diciptakan maka para lulusan pendidikan vokasi lebih memiliki peluang untuk menemukan lapangan pekerjaannya. Serta di sisi lain perusahaan-perusahaan di Daerah ataupun di luar itu mendapatkan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan SDM sesuai bidang yang mereka butuhkan.

**f. Program Sukabumi Artist Association,**

Program *Sukabumi Artist Association* merupakan program yang menjembatani seniman dengan pihak-pihak perusahaan agar karya-karya para seniman di Daerah bisa terpublikasikan, dikenali, dan dinikmati masyarakat yang tidak saja memiliki nilai estetis namun juga memiliki nilai bisnis.

**6. Penanganan dan pemulihan dampak pandemi Covid-19**

Mencermati penyebaran dan penularan COVID-19 di Indonesia yang semakin memprihatinkan, Pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah menyatakan COVID-19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat dan menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Indonesia yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Presiden juga telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional, yang menyatakan bahwa penanggulangan bencana nasional yang diakibatkan oleh penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID19) dan gubernur, bupati, dan walikota sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di daerah, dalam

menetapkan.....

menetapkan kebijakan di daerah masing-masing harus memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat.

Menyikapi kondisi tersebut maka Daerah telah menerbitkan beberapa regulasi dalam rangka penanganan pandemi covid-19 yakni:

- Keputusan Wali Kota Sukabumi Nomor 188.45/90-BPBD/2020 tentang Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease-19* di Kota Sukabumi pada bulan April 2020;
- Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2020, tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Covid19 di Wilayah Kota Sukabumi;
- Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid19 di Kota Sukabumi.

#### **a. Kesehatan**

Dampak pandemi Covid-19 di sektor kesehatan yang paling fatal adalah kematian. Terdapat juga dampak penyerta lainnya terkait dengan pengendalian dan penanganan pasien yang terkonfirmasi positif diantaranya proses karantina atau isolasi dan penyembuhan pasien dengan gejala berat akibat efek infeksi Covid-19. Karena itu strategi penanganan dan pemulihan pandemi covid-19 di sektor kesehatan terdiri dari 2 (dua) hal besar, yaitu pencegahan dan yang kedua adalah penyembuhan untuk pasien yang terkonfirmasi positif.

Untuk tahap pencegahan penularan lebih jauh dari Covid-19 adalah dengan menerapkan aktivitas 3M dan 4T sebagaimana dikampanyekan oleh WHO maupun Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Penerapan 3M dapat dilakukan dengan menjalankan setidaknya 3 (tiga) perilaku disiplin yaitu:

- Memakai masker
- Mencuci tangan
- Menjaga jarak dan menghindari kerumunan

Hal kedua, penerapan kebijakan 4T (*Tracking, Tracing, Testing, Treatment*). *Tracking* adalah penelusuran yaitu ketika terjadi kasus konfirmasi positif Covid-19 ditelusuri sumber penularannya. *Tracing*

adalah.....

adalah pelacakan dilakukan pada kontak-kontak terdekat pasien positif Covid-19. *Testing* adalah pemeriksaan agar bisa mendapatkan perawatan dengan cepat dan bisa menghindari potensi penularan. *Treatment* adalah perawatan dilakukan bagi pasien positif Covid-19.

Penyediaan infrastruktur dalam bentuk fasilitas air, sanitasi, dan alat kebersihan menjadi bagian penting agar staregi 3M dapat benar-benar dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat. Termasuk di dalamnya informasi yang mengulas protokol proses disinfeksi di sekolah, fasilitas kesehatan, dan tempat-tempat publik.

Adapun upaya yang bersifat kuratif bagi pasien yang terkonfirmasi positif dan menunjukkan gejala pernapasan untuk tetap tinggal di rumah, mengisolasi diri, dan segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan. Daerah memerlukan upaya lebih besar dengan menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam jumlah besar di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan. Sarana dan prasarana ini meliputi stok Alat Pelindung Diri, ventilator, respirator, bahan dan sarpras medis lainnya. Selain itu perlu kantong-kantong mayat dan tata cara pemakaman yang aman untuk setiap orang yang meninggal akibat infeksi covid-19.

Untuk penanganan dan pemulihan pandemi covid-19 di sektor kesehatan Pemerintah Daerah sudah menyiapkan program dan kegiatan yang diharapkan mampu menangani permasalahan pandemi covid19 di Daerah. Adapun program dan kegiatan tersebut adalah program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dengan kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota, kegiatan pengelolaan surveilans kesehatan, kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB), pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan dan kegiatan pengadaan bahan habis pakai. Rencana anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dari tahun 2021 sampai dengan 2023 adalah sebesar Rp. 283.490.123.120 (dua ratus delapan puluh tiga milyar empat ratus sembilan puluh juta seratus dua puluh tiga ribu seratus dua puluh rupiah).

b. sektor .....

## **b. Sektor Sosial**

Kasus Covid-19 di Indonesia telah hampir melumpuhkan kegiatan ekonomi masyarakat. Sejak pemerintah menerapkan berbagai kebijakan seperti *Work From Home*, pembatasan wilayah, dan penutupan berbagai tempat publik seperti tempat wisata, banyak perusahaan atau perkantoran yang meliburkan pegawainya. Para pengusaha UMKM juga bahkan ada yang memutihkan karyawan (PHK) sebagai antisipasi dampak penutupan usaha dalam waktu yang belum ditentukan.

Tidak hanya itu, pekerja sektor informal juga sangat dirugikan akibat kasus Covid-19 ini. Para pekerja informal yang biasanya mendapatkan pendapatan harian kini kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya. Mereka adalah pekerja warung, toko kecil, pedagang asongan, pedagang di pasar, pengendara ojek *online*, hingga pekerja lain yang menggantungkan hidup dari pendapatan harian termasuk di pusat-pusat perbelanjaan.

Dampak pandemi Covid 19 terhadap dunia ketenagakerjaan di Indonesia dilihat dari sisi pekerja, pengusaha dan usaha mandiri. Berdasarkan penelitian dari LIPI yang terbaru, dari sisi pekerja, terjadinya gelombang PHK tenaga kerja dan penurunan pendapatan sebagai akibat terganggunya kegiatan usaha pada sebagian besar sektor. Sebanyak 15,6% pekerja mengalami PHK dan 40% pekerja mengalami penurunan pendapatan, diantaranya sebanyak 7% pendapatan buruh turun sampai 50%. Kondisi ini berpengaruh pada kelangsungan hidup pekerja serta keluarga korban PHK tersebut.

Dari sisi pengusaha, pandemi Covid 19 menyebabkan terhentinya kegiatan usaha dan rendahnya kemampuan bertahan pengusaha. Hasil survei LIPI mencatat 39,4 persen usaha terhenti, dan 57,1 persen usaha mengalami penurunan produksi. Hanya 3,5 persen yang tidak terdampak. Kemampuan bertahan di kalangan dunia usaha juga mengalami keterbatasan. Sebanyak 41% pengusaha hanya dapat bertahan kurang dari tiga bulan. Artinya pada bulan Agustus 2020 usaha mereka akan terhenti. Sebanyak 24% pengusaha mampu bertahan selama 3-6 bulan, 11% mampu bertahan selama 6-12 bulan ke depan, dan 24% mampu bertahan lebih dari 12 bulan.

Sementara .....

Sementara dampak Covid 19 pada usaha mandiri membuat usaha menjadi terhenti dan sebagian mengalami penurunan produksi. Sebanyak 40% usaha mandiri terhenti kegiatan usahanya, dan 52% mengalami penurunan kegiatan produksi. Hal ini berdampak 35% usaha mandiri tanpa pendapatan dan 28 persen pendapatan menurun hingga 50 persen.

Dampak Covid 19 juga berdampak pada pekerja bebas sektor pertanian dan non-pertanian atau pekerja “serabutan” yang bekerja jika ada permintaan bekerja. Hasil survei menunjukkan sebanyak 55% pekerja bebas pertanian dan non-pertanian tidak ada pekerjaan, dan 38% order berkurang. Dilihat dari pendapatan, sebanyak 58% pekerja bebas tidak memiliki pendapatan selama masa pandemi Covid 19 dan 28% pendapatan berkurang sampai 30%.

Masalah Covid-19 juga dikhawatirkan berdampak pada peningkatan tindakan kriminal. Tindakan kriminal yang dilakukan bisa beragam seperti pencurian alat pelindung diri yang tengah langka saat ini, pembuatan *handsanitizer* atau desinfektan palsu yang justru membahayakan kesehatan, penipuan harga bahan pokok, dan lain-lain.

Merujuk pada permasalahan sosial di atas, beberapa terobosan harus dilakukan dalam rangka menekan laju kenaikan angka kemiskinan yang berdampak pada sektor sosial melalui pengoptimalisasian pelayanan rehabilitasi sosial dan pemberian perlindungan serta jaminan sosial pada masyarakat dengan meningkatkan peran serta PSKS (baik individu maupun institusional) sehingga dapat menciptakan masyarakat yang lebih berdaya dalam menghadapi perubahan sosial di lapangan. Oleh karena itu perlu disusun strategi baru yang melahirkan program dan kegiatan yang adaptif dan responsif dengan kondisi yang ada.

Salah satu upaya Pemerintah Pusat dalam rangka pemulihan dampak pandemi covid 19 di sektor sosial adalah dengan memberikan bantuan sosial dan insentif sebagai stimulus bagi masyarakat. Aliran bantuan ini akan disalurkan melalui program-program pemerintah seperti program keluarga harapan, kredit usaha rakyat, kredit ultra mikro, kartu sembako, hingga program bantuan pangan non tunai. Diharapkan bansos dan stimulus akan

meningkatkan .....

meningkatkan daya beli dan memberikan bantuan modal kerja bagi masyarakat untuk memulai kembali usahanya sehingga ekonomi bertahap akan bangkit.

Untuk penanganan dan pemulihan pandemi covid-19 di sektor social, Pemerintah Daerah sudah menyiapkan program yang diharapkan mampu menangani permasalahan pandemi covid19 di Daerah. Adapun program tersebut adalah program pemberdayaan sosial, program rehabilitasi sosial, program perlindungan sosial dan program penanganan bencana. Rencana anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dari tahun 2021 sampai dengan 2023 sebesar Rp. 7.894.750.000 (Tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

### **c. Sektor Ekonomi**

Penanganan Dampak Covid-19 pada sektor ekonomi dipadupadankan dengan program yang bersumber dari Pusat dan Provinsi. Daerah berfokus kepada UMKM yang bergerak pada kelompok *demand*, *supply* dan koneksi *demand* dan *supply*. Dari sisi *demand* program yang dicanangkan adalah program tumbuh bersama dengan strategi penyebaran konten positif bertujuan agar tidak takut untuk berinteraksi selama protokol kesehatan dilaksanakan dan pemberdayaan ekonomi dengan pembelian produk lokal Daerah. Sisi *supply* akan diintervensi oleh program simpul *space* yang bertujuan untuk penguatan kelembagaan UMKM dengan pendampingan dalam sektor kelembagaan, finansial dan proses bisnis, sedangkan untuk mempertemukan *supply* dan *demand* akan diintervensi oleh program “koneksi” dengan tujuan memaksimalkan hubungan *supply* dan *demand* agar terjadi transaksi.

Selain itu strategi lainnya adalah menstimulasi dan membentuk jiwa wirausaha (*entrepreneur*) untuk para korban PHK dan angkatan kerja yang belum bekerja, melalui pelatihan yang membangun *mindset*, *skill fundamental* bagi *entrepreneur*; akses pembiayaan tanpa anggunan dengan bunga rendah (KUR) dari lembaga keuangan BUMD atau BUMN dan pendampingan usaha dari pihak terkait pemerintah Daerah maupun swasta.

Untuk.....

Untuk penanganan dan pemulihan pandemi covid-19 di sektor ekonomi Pemerintah Daerah sudah menyiapkan program yang diharapkan mampu menangani permasalahan pandemi covid19 di Daerah. Adapun program tersebut adalah program pelayanan izin usaha simpan pinjaman, program pengawasan dan pemeriksaan koperasi, program penilaian kesehatan KSP/USP koperasi, program pendidikan dan latihan perkoperasian, program pemberdayaan dan perlindungan koperasi, program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM), program pengembangan UMKM, program perizinan dan pendaftaran perusahaan, program peningkatan sarana distribusi perdagangan, program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, program pengembangan ekspor, program standarisasi dan perlindungan konsumen, program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri , program perencanaan dan pembangunan industri, program pengendalian izin usaha industri Kabupaten/Kota dan program pengelolaan sistem informasi industri nasional. Rencana anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dari tahun 2021 sampai dengan 2023 sebesar Rp. 42.324.774.000 (Empat puluh dua milyar tiga ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Pelaksanaan prioritas pembangunan daerah sebagaimana diuraikan di atas, menjadi sebuah amanat yang harus diprioritaskan. Selain program unggulan tersebut, maka prioritas pembangunan juga diarahkan untuk penerapan Standar Pelayanan Minimal atau SPM sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar ke dalam dokumen perencanaan yaitu RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah.

Jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) jenis sebagaimana disajikan pada Tabel 6.4 berikut.

**Tabel 6.4**  
**Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)**  
**Tahun 2019 s.d 2020**

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian Tahun 2019	Target tahun 2020	Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Dasar	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
<b>SPM PENDIDIKAN</b>						
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah WNI usia 5-6 tahun yang bisa sekolah PAUD	76%	100%	Program Pendidikan Anak Usia Dini	DISDIKBUD
2	Pendidikan Dasar	Jumlah WNI yang bisa sekolah SD	105%	100%	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	DISDIKBUD
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah WNI yang bisa sekolah kesetaraan	55,86%	100%	Program Pendidikan Non Formal	DISDIKBUD
<b>SPM KESEHATAN</b>						
4	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100%	100%	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Dinas Kesehatan
5	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan	100%	100%	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Dinas Kesehatan
6	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi	100%	100%	Program Peningkatan Keselamatan ibu melahirkan dan anak	Dinas Kesehatan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian Tahun 2019	Target tahun 2020	Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Dasar	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7	Pelayanan kesehatan balita	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	100%	100%	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Dinas Kesehatan
8	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
9	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	19,98%	100%	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (P2M)	Dinas Kesehatan
10	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	67,72%	100%	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Dinas Kesehatan
11	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase Penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (P2M)	Dinas Kesehatan
12	Pelayanan kesehatan diabetes melitus	Persentase Penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (P2M)	Dinas Kesehatan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian Tahun 2019	Target tahun 2020	Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Dasar	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
13	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	100%	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (P2M)	Dinas Kesehatan
14	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai	100%	100%	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (P2M)	Dinas Kesehatan
15	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%	100%	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (P2M)	Dinas Kesehatan
<b>SPM PEKERJAAN UMUM</b>						
16	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	90,85%	100%	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	DPUPRKP2
17	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	96,78%	100%	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	DPUPRKP2
<b>SPM PERUMAHAN RAKYAT</b>						

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian Tahun 2019	Target tahun 2020	Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Dasar	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
18	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten kota/ kabupaten	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	100%	- Program Pengembangan Perumahan - Program tanggap darurat jalan dan jembatan	DPUPRPKP2
19	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah daerah kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni	100%	100%	Program Pengembangan Perumahan	DPUPRPKP2
<b>SPM KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>						
20	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah warga yang mendapatkan layanan trantibum dalam semua aktivitas	100%	100%	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	DINAS SATPOL PP
21	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	BPBD
22	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	BPBD

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian Tahun 2019	Target tahun 2020	Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Dasar	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
23	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	BPBD
24	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	100%	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	BPBD
<b>SPM SOSIAL</b>						
25	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Dinas Sosial
26	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Dinas Sosial
27	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Dinas Sosial

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian Tahun 2019	Target tahun 2020	Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Dasar	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
28	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	100%	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Dinas Sosial
29	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Dinas Sosial

Sumber : Bappeda diolah, 2020

**Tabel 6.5**  
**Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)**  
**Tahun 2021 s.d 2023**

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Tahun 2021	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Dasar	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
<b>SPM PENDIDIKAN</b>							
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah WNI usia 5-6 tahun yang bisa sekolah PAUD	100%	100%	100%	Program Pengelolaan Pendidikan	DISDIKBUD
2	Pendidikan Dasar	Jumlah WNI yang bisa sekolah SD	100%	100%	100%	Program Pengelolaan Pendidikan	DISDIKBUD
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah WNI yang bisa sekolah kesetaraan	100%	100%	100%	Program Pengelolaan Pendidikan	DISDIKBUD
<b>SPM KESEHATAN</b>							
4	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100%	100%	100%	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan
5	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan	100%	100%	100%	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan
6	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi	100%	100%	100%	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan
7	Pelayanan kesehatan balita	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	100%	100%	100%	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Tahun 2021	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Dasar	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
8	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan
9	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan
10	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan
11	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase Penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan
12	Pelayanan kesehatan diabetes melitus	Persentase Penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
13	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	100%	100%	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan
14	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai	100%	100%	100%	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan
15	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%	100%	100%	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Tahun 2021	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Dasar	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
<b>SPM PEKERJAAN UMUM</b>							
16	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	100%	100%	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPUTR
17	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	100%	100%	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah	DPUTR
<b>SPM PERUMAHAN RAKYAT</b>							
18	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten kota/ kabupaten	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	100%	100%	Program Pengembangan Perumahan	DPUTR
19	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah daerah kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni	100%	100%	100%	Program Pengembangan Perumahan	DPUTR
<b>SPM KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>							
20	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah warga yang mendapatkan layanan trantibum dalam semua aktivitas	100%	100%	100%	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban umum	SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Tahun 2021	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Dasar	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
21	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%	100%	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
22	Peayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
23	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%	Program Penanggulangan Bencana;	BPBD
24	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	100%	100%	Program Penanggulangan Kebakaran	SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN
<b>SPM SOSIAL</b>							
25	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	100%	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
26	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	100%	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
27	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%	100%	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Tahun 2021	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Dasar	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
28	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	100%	100%	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
29	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%	100%	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial

Sumber : Bappeda diolah, 2020

#### **6.4. Program Pembangunan Daerah**

Program pembangunan Daerah tahun 2018-2023 merupakan pelaksanaan dari sasaran pembangunan jangka menengah yang mencerminkan pelaksanaan prioritas pembangunan Daerah. Program pembangunan Daerah disajikan dalam 2 (dua) tabel yaitu Tabel 6.6 yang memuat program pembangunan Daerah yang dilaksanakan tahun 2019 dan proyeksi anggaran tahun 2020, Tabel 6.7 memuat program pembangunan Daerah disertai pagu indikatif tahun 2021-2023. Hal ini dilakukan karena terdapat beberapa perbedaan nomenklatur program berdasarkan permendagri 90 tahun 2019 dan pemutakhirannya. Adapun lebih rinci mengenai rencana program pembangunan daerah yang disertai target dan pendanaan Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 disajikan pada Buku II.

Selain program pembangunan Daerah, terdapat beberapa proyek strategis yang akan dilaksanakan di Daerah yang dibiayai dari berbagai sumber anggaran. Hal ini merupakan cerminan dari aspek kolaborasi dalam hal pendanaan dan menunjukkan adanya pertimbangan efisiensi penentuan program sesuai dengan prioritas pembangunan. Proyek strategis Daerah tahun 2020-2023 disajikan pada Tabel 6.8.

**Tabel 6.8**  
**Rencana Proyek Strategis Daerah Tahun 2020 – 2023**

NO.	KEGIATAN	SUMBER ANGGARAN					TARGET
		APBN	APBD PROV	APBD	KPBU	SWASTA	
1	Pembangunan alun-alun		√				2021-2022
2	Pembangunan <i>creative centre</i>		√				2022
3	Pembangunan gedung pusat budaya		√				2022
4	Penataan Lapang Merdeka		√				2021-2022
5	Pembangunan gedung parkir		√	√			2022-2023
6	Fasilitasi RDF (Persampahan)	√	√	√			2022-2023
7	pembangunan kawasan pusat pemerintahan		√	√			2021-2023
8	Pembangunan pasar Lembursitu		√				2021
9	Kawasan wisata Cikundul		√				2023
10	Penataan sungai Cipelang	√					2020-2022
11	Pembangunan gedung BPBD			√			2022-2023
12	Penataan kawasan wisata rengganis		√				2021-2022
13	Penataan pedestrian 10 ruas jalan 1. jalan A. yani		√	√			2021-2023

NO.	KEGIATAN	SUMBER ANGGARAN					TARGET
		APBN	APBD PROV	APBD	KPBU	SWASTA	
	2. Jalan Ciwangi 3. Jalan Siliwangi 4. Jalan Perintis Kemerdekaan 5. Jalan Suryakencana 6. Jalan Lettu bakri 7. Jalan Sudirman 8. Jalan R.E Martadinata 9. Jalan R. Syamsudin S.H 10. Jalan Otistta						
14	Penataan Sarana Umum Masal (SAUM)		√	√			2022-2023
15	Pembangunan 33 kelurahan Sport center			√			2021-2022
16	Penyusunan RDTR	√		√			2022
17	Pembangunan Kawasan Sungai Cipelang	√		√			2021 - 2023
18	Pengembangan TPA Bersama	√	√	√			2021 - 2023
19	Lanjutan Pembangunan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)			√			2021 - 2022
20	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	√	√	√			2021 - 2023
21	Penanganan Kawasan Kumuh	√	√	√			2021 - 2023
22	Optimalisasi Terminal Tipe A & C	√	√	√			2022-2023

NO.	KEGIATAN	SUMBER ANGGARAN					TARGET
		APBN	APBD PROV	APBD	KPBU	SWASTA	
23	Pembangunan Gapura Batas Kota	√	√	√			2021 - 2023
24	Pembangunan Water Treatment Plant	√		√			2022 - 2023
25	Pembangunan Taman Keanekaragaman Hayati	√	√	√			2021 - 2023
26	Pembangunan sarana PJU		√	√			2021 - 2023
27	Revitalisasi Pasar Tradisional		√	√			2021-2023
28	Finalisasi Gedung GOR Merdeka			√			2021

Sumber : Hasil Analisis Bappeda, 2020